JEMBA: Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting
Journal Homepage: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jemba/index

DETERMINASI KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BUMN PERIODE 2021-2023

Maharani Putri[1], Ony Widilestariningtyas[2]
[1] *Universitas Komputer Indonesia, maharani.21120019@mahasiswa.unikom.ac.id*
[2] *Universitas Komputer Indonesia, ony.widilestariningtyas@email.unikom.ac.id*

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel
Received:08-09-2024
Revised:28-12-2024
Accepted:31-12-2024

Keywords:
Managerial Ownership, Institutional Ownership, Tax Avoidance

ABSTRACT

This study identifies a phenomenon where managerial ownership and institutional ownership have a relatively small influence, yet the level of tax avoidance increases, which contradicts existing theories and becomes the primary focus of this research. The objective of this study is to evaluate the extent of the impact of Managerial Ownership and Institutional Ownership on Tax Avoidance in state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange. The research methodology includes descriptive analysis and verificative analysis with a quantitative approach. The population of this study consists of financial reports from state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange, with a sample of 10 companies over the period 2021-2023. The data used is secondary data published by the Indonesia Stock Exchange (IDX). The data analysis method applied is multiple linear regression. The results of the study indicate that Managerial Ownership and Institutional Ownership have a significant positive effect on Tax Avoidance. This means that an increase in Managerial Ownership and Institutional Ownership is followed by an increase in Tax Avoidance, and vice versa. This study is expected to provide useful information for companies and serve as a reference for future research, particularly in the sector of state-owned enterprises.

Kata Kunci:
Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi fenomena di mana kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang relatif kecil, tetapi tingkat penghindaran pajak meningkat, yang bertentangan dengan teori yang ada dan menjadi fokus utama penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh Kepemilikan Manajerial

dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan sampel sebanyak 10 perusahaan selama periode 2021-2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis data yang diterapkan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Artinya, peningkatan dalam Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional akan diikuti oleh peningkatan dalam Penghindaran Pajak, dan sebaliknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di sektor BUMN.

1. PENDAHULUAN

Pada awalnya, pajak di Indonesia dikenal dengan istilah Huitaks sejak tahun 1816. Huitaks adalah jenis pajak yang dikenakan kepada penduduk yang tinggal di area tertentu. Seiring waktu, sistem perpajakan telah berkembang pesat. Sebagai warga negara Indonesia yang patuh, membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi (Hamidah et al., 2023:13-14).

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak telah mencapai Rp 342,88 triliun hingga 15 Maret 2024, namun realisasi ini hanya mencapai 17,24% dari target APBN 2024. Sri Mulyani menjelaskan bahwa perlambatan penerimaan pajak disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada tahun 2023 yang dampaknya baru terasa tahun ini. Akibatnya, tahun 2023 perusahaan-perusahaan mengajukan restitusi pajak. Meski demikian, penerimaan pajak bruto di luar restitusi masih tumbuh sebesar 5,74% hingga 15 Maret 2024 (Afriyadi, 2024).

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung kemajuan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak memainkan fungsi strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, yang terlihat dari peningkatan persentase kontribusi pajak setiap tahunnya (Agustina, 2020:409).

Seringkali, perusahaan-perusahaan khususnya di sektor pertambangan tidak ingin terbeban dengan pajak sehingga berakibat pada tindakan penghindaran pajak. Hal ini terjadi pada PT Aneka Tambang Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan mengakali pajak emas impor yang berasal dari Singapura, diketahui barang tersebut ketika dari Singapura semestinya terkena bea impor 2.5% dan PPh impor 5% namun ketika sampai di bandara kode barang berubah sehingga tidak terkena

pajak (2020) (Umah, 2021).

Penghindaran pajak pada perusahaan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Kepemilikan saham oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer, institusi, dan pemerintah, dapat memengaruhi keputusan perpajakan Perusahaan (Umah, 2021). Beberapa faktor dapat menjadi penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak. Di sebuah perusahaan, terdapat kepemilikan saham, yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional.

Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajerial. Sebagai pemangku kepentingan, manajemen cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar keputusan tersebut tidak merugikan nilai saham mereka (Hidayati, 2022:34-35). Hal ini juga termasuk keputusan terkait strategi penghindaran pajak, yang bisa menimbulkan risiko di masa depan. Ketika tingkat kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan meningkat, peran manajemen dalam pengambilan kebijakan terkait tax avoidance cenderung menurun (Hidayati, 2022:34-35).

Kepemilikan institusional merujuk pada saham yang dimiliki oleh entitas di luar perusahaan, seperti pemerintah, bank, perusahaan investasi, dan investor asing. Kepemilikan ini dapat membantu pihak prinsipal dalam mengawasi perilaku agen di perusahaan, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak. Institusi dengan kepentingan signifikan terhadap investasi, termasuk saham, akan menugaskan divisi tertentu untuk mengelola investasi mereka (Tarmizi & Perkasa, 2022:113). Keberadaan institusi ini memungkinkan pemantauan yang lebih ketat terhadap perkembangan investasi, yang pada gilirannya meningkatkan pengendalian terhadap tindakan manajemen dan mempengaruhi keputusan mereka terkait praktik penghindaran pajak (Tarmizi & Perkasa, 2022:113).

Penelitian terdahulu menurut Putri & Lawita (2019:74) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu penelitian menurut Haloho (2021:718) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian menurut Pertiwi & Juniarti (2020:16) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu menurut Hikmah & Sulistyowati (2020:12) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian menurut Afrika (2021:142) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian menurut Dewi & Oktaviani (2021:191-192) yang menyatakan ahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan , peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu 1) Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan BUMN periode 2021-2023. (2) Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan BUMN periode 2021-2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN periode 2021-2023.

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kepemilikan saham mempengaruhi penghindaran pajak dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di perusahaan BUMN, serta mengusulkan strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, memastikan kontribusi perusahaan BUMN yang adil terhadap pendapatan negara. Terakhir, penelitian ini juga akan mengisi celah dalam literatur akademik yang ada, karena studi tentang penghindaran pajak di perusahaan BUMN dengan fokus pada kepemilikan saham masih terbatas, memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman dan praktik perpajakan di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

Menurut Yamasitha et al., (2024:24) kepemilikan manajerial merujuk pada situasi di mana para manajer memiliki saham dalam struktur modal perusahaan, sehingga mereka berfungsi sebagai manajer sekaligus pemegang saham. Jika tingkat kepemilikan saham manajerial di suatu perusahaan tinggi, maka pengaruh pihak manajemen terhadap praktik penghindaran pajak juga akan semakin besar, karena kepemilikan manajerial yang tinggi tidak efektif dalam mengurangi perilaku penghindaran pajak (Meliani & Lesmana, 2021:12).

H1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Yeni et al., (2024:48) kepemilikan institusional adalah keadaan di mana suatu institusi memiliki saham dalam jumlah signifikan, sehingga memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional juga memberikan kontrol atas kebijakan keuangan perusahaan, karena institusi tersebut berperan sebagai pemegang saham utama. Peningkatan jumlah kepemilikan saham oleh institusi dapat mendorong perilaku penghindaran pajak perusahaan, karena kepemilikan institusional yang pasif memberi kebebasan lebih kepada manajer untuk melakukan penghindaran pajak (Nanditama & Ardiyanto, 2021:3).

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kuantitatif ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Jenis penelitian atau metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kuantitatif. Oleh karena itu, data kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan penghindaran pajak dari penelitian ini berupa data kuantitatif. Adapun unit analisis penelitian adalah perusahan-perusahaan BUMN. Penelitian ini menggunakan data

sekunder yaitu data yang didapat merupakan data yang telah diolah pihak lain.

Populasi yang akan diambil peneliti adalah laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Laba rugi dan Modal saham pada laporan tahunan perusahaan BUMN periode 2021-2023. Sebanyak 30 laporan keuangan perusahaan selama 3 periode sejak tahun 2021 – 2023 sehingga jumlah populasi adalah sebanyak 90 Laporan Keuangan, karena fenomena terjadi diantara 30 laporan keuangan perusahaan. Sampel yang akan diambil dari penelitian ini adalah 10 perusahaan BUMN dan laporan keuangan tahunannya dari tahun 2021-2023. Sehingga sampel yang digunakan sebanyak (10 perusahaan x 3 periode) 30 laporan keuangan.

Metode pengujian data yang digunakan mengacu pada Uji Asumsi Klasik. Metode analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, verifikatif, regresi linier berganda, korelasi *pearson* dan koefisien determinasi serta uji hipotesis dengan menggunakan *software* SPSS Versi 23.0.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1.
Hasil Analisis Deskriptif Kepemilikan Manajerial

No	Kode Perusahaan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	ADHI	0,5100	0,6433	0,6433
2	JSMR	0,7000	0,7000	0,7003
3	WTON	0,7022	0,3836	0,4912
4	BEKS	0,6611	0,6611	0,6611
5	BBTN	0,6005	0,6008	0,6014
6	BBRI	0,5320	0,5320	0,5321
7	ANTM	0,6500	0,6500	0,6500
8	SMBR	0,4193	0,4128	0,4128
9	PTBA	0,6593	0,6593	0,6593
10	ELSA	0,5110	0,5110	0,5110
Maksimum		0,7022	0,7000	0,7003
Minimum		0,4193	0,3836	0,4128
Rata-Rata		0,5945	0,5754	0,5863

Sumber: Data yang diolah (2024)

Perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan manajerial tertinggi (No. 3 / WTON di tahun 2021, No. 2/ JSMR di tahun 2022, dan No.2 / JSMR di tahun 2023) dari tahun 2021 hingga 2023 adalah PT. JSMR dan PT. WTON. Sementara itu, perusahaan-perusahaan dengan nilai kepemilikan manajerial terendah (No. 8 / SMBR di tahun 2021, No. 3/ WATON di tahun 2022, dan No.8 / SMBR di tahun 2023) dari tahun 2021 hingga 2023 adalah PT. SMBR dan PT. WTON.

Tabel 2.
Hasil Uji Deskriptif Kepemilikan Institusional

No	Kode Perusahaan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	ADHI	0,4900	0,3567	0,3567
2	JSMR	0,3789	0,3016	0,3510
3	WTON	0,6652	0,6116	0,5727
4	BEKS	0,3389	0,3389	0,3389
5	BBTN	0,3995	0,3992	0,3986
6	BBRI	0,4679	0,4648	0,4629
7	ANTM	0,3500	0,3500	0,3500
8	SMBR	0,4855	0,4884	0,5771
9	PTBA	0,3378	0,3378	0,3378
10	ELSA	0,4890	0,4890	0,4890
Maksimum		0,6652	0,6116	0,5771
Minimum		0,3378	0,3016	0,3378
Rata-Rata		0,4403	0,4138	0,4235

Sumber: Data yang diolah (2024)

Perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan institusional tertinggi (No. 3 / WTON di tahun 2021, No. 3/ WATON di tahun 2022, dan No.8 / SMBR di tahun 2023) dari tahun 2021 hingga 2023 adalah PT. WTON dan PT. SMBR. Sementara itu, perusahaan-perusahaan dengan nilai kepemilikan institusional terendah (No. 9 / PTBA di tahun 2021, No. 2/ JSMR di tahun 2022, dan No.9 / PTBA di tahun 2023) dari tahun 2021 hingga 2023 adalah PT. PTBA dan PT. JSMR.

Tabel 3.
Hasil Uji Deskriptif Agresivitas Pajak

No	Kode Perusahaan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	ADHI	0,3465	0,2008	0,1656
2	JSMR	0,2799	0,2242	0,2397
3	WTON	0,2927	0,3027	0,2341
4	BEKS	0,1033	0,1274	0,2327
5	BBTN	0,2741	0,2584	0,2331
6	BBRI	0,2724	0,2440	0,1868
7	ANTM	0,3591	0,3051	0,2609
8	SMBR	0,0912	0,4566	0,0247
9	PTBA	0,1262	0,2442	0,3093
10	ELSA	0,1063	0,3129	0,0570
Maksimum		0,3591	0,4566	0,3093
Minimum		0,0912	0,1274	0,0247
Rata-Rata		0,2252	0,2676	0,1944

Sumber: Data yang diolah (2024)

Perusahaan-perusahaan dengan penghindaran pajak tertinggi (No. 7 / ANTM di tahun 2021, No. 8 / SMBR di tahun 2022, dan No.9 / PTBA di tahun 2023) dari tahun 2021 hingga 2023 adalah PT. ANTM, PT. PTBA, dan PT. SMBR. Sementara itu, perusahaan-perusahaan dengan penghindaran pajak terendah (No. 8 / SMBR di tahun 2021, No. 4/ BEKS di tahun 2022, dan No.8 / SMBR di tahun 2023) dari tahun 2021 hingga 2023 adalah PT. SMBR dan PT. BEKS.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas Data Setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01916115
Most Extreme Differences	Absolute	,140
	Positive	,091
	Negative	-,140
Test Statistic		,140
Asymp. Sig. (2-tailed)		,138[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

Dari Tabel 4 dapat dilihat nilai signifikansi (*Asymp*. Sig. (2-tailed) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,138 > 0,05, dapat disimpulkan model regresi berdistribusi normal.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kepemilikan Manajerial	,736	1,358
	Kepemilikan Institusional	,736	1,358

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 5 data uji multikolinearitas diatas, dapat diketahui nilai tolerance variabel-variabel bebas lebih besar dari 0,1 yaitu 0,736. Lalu, nilai VIF untuk masing-masing variabel sebesar 1,358 apabila dilihat pada hipotesis, nilai ini kurang dari 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara variabel Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional tidak terjadi gejala multikolinearitas.

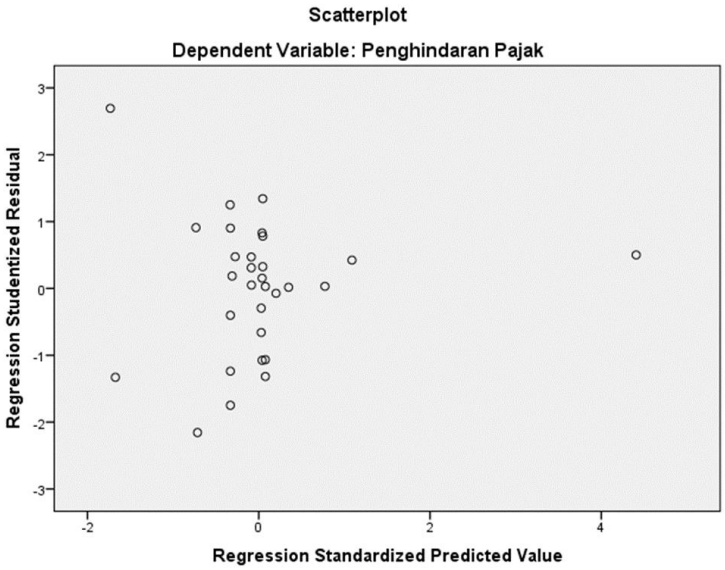

Gambar 1.
Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Lampiran Output SPSS, 2024

Titik-titik dalam gambar 1 grafik *scatterplot* hasil uji heteroskedastisitas terlihat menyebar berada di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y atau menyebar secara acak. Titik-titik diatas tidak satupun membentuk pola tertentu baik itu garis maupun sebuah lengkungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas tetapi sebaliknya yaitu homoskedastisitas.

Tabel 6.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,799[a]	,638	,611	,0305006	1,653

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

Dari tabel 6, diperoleh nilai DW sebesar 2,203 yang kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai Dl dan Du berdasarkan nilai tabel *Durbin Watson* dengan nilai alpha = 5% (0,05). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 (N) dan jumlah variabel independen 2 (K-2) sehingga didapatkan nilai Dl sebesar 1,284 dan Du 1,567. Dari kriteria sebelumnya yang sudah dijelaskan, nilai DW lebih besar dibandingkan dengan Du (1,653>1,567) dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4-Du, diketahui bahwa nilai 4-Du adalah 2,433 sehingga 1,653 < 2,433. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi (1,567 < 1,653 < 2,433).

Analisis Data

Tabel 7.
Hasil Koefisien Persamaan Regresi Liner Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,164	,057		-2,854	,008
	Kepemilikan Manajerial	,392	,065	,812	6,016	,000
	Kepemilikan Institusional	,385	,064	,807	5,981	,000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

Dari tabel 7, hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui pada output tabel 4.11 diatas dan diperoleh nilai α sebesar -0,164, β1 sebesar 0,392 dan β2 nilainya sebesar 0,385. Lalu, persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = -0{,}164 + (0{,}392)X_1 + (0{,}385)X_2$$

Konstanta -0,164; artinya apabila Kepemilikan Manajerial (X_1) dan Kepemilikan Institusional (X_2) nilainya 0, maka Penghindaran Pajak (Y) akan bernilai sebesar -0,164. Koefisien regresi variabel Kepemilikan Manajerial (X_1) sebesar 0,392 artinya; apabila variabel independen lain bernilai tetap dan Kepemilikan Manajerial mengalami peningkatan sebesar 1, maka Penghindaran Pajak (Y) nilainya akan mengalami kenaikan sebesar 0,392. Koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional (X_2) nilainya sebesar 0,385 artinya; apabila variabel independen lain bernilai tetap dan Kepemilikan Institusional mengalami peningkatan sebesar 1, maka Penghindaran Pajak (Y) nilainya akan mengalami kenaikan sebesar 0,385.

Tabel 8.
Hasil Koefisien Korelasi *Pearson* Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Correlations

		Kepemilikan Manajerial	Penghindaran Pajak
Kepemilikan Manajerial	Pearson Correlation	1	,397*
	Sig. (2-tailed)		,030
	N	30	30
Penghindaran Pajak	Pearson Correlation	,397*	1
	Sig. (2-tailed)	,030	
	N	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

Dari tabel 8, koefisien korelasi *pearson* variabel Kepemilikan Manajerial dengan Penghindaran Pajak nilainya sebesar 0,397 berada pada interval 0,20 - 0,399. Kepemilikan Manajerial mempunyai hubungan yang rendah dengan Penghindaran Pajak. Koefisien korelasi tersebut (+) artinya terdapat hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa signifikansi angka sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05 dan dapat dikatakan signifikan secara statistik. Dapat disimpulkan bahwa antara Kepemilikan Manajerial dengan Penghindaran Pajak memiliki hubungan positif atau hubungan searah dimana apabila Kepemilikan Manajerial naik maka Penghindaran Pajak akan naik.

Tabel 9.
Hasil Koefisien Korelasi *Pearson* Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Correlations

		Kepemilikan Institusional	Penghindaran Pajak
Kepemilikan Institusional	Pearson Correlation	1	,390*
	Sig. (2-tailed)		,033
	N	30	30
Penghindaran Pajak	Pearson Correlation	,390*	1
	Sig. (2-tailed)	,033	
	N	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

Dari tabel 9, koefisien korelasi *pearson* variabel Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak nilainya sebesar 0,390 berada pada interval 0,20 - 0,399. Kepemilikan Institusional mempunyai hubungan yang rendah dengan Penghindara Pajak. Koefisien korelasi tersebut (+) artinya terdapat hubungan rendah Kepemilikan Institusional dengan Agresivitas Pajak menunjukkan bahwa signifikansi angka sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05 dan dapat dikatakan signifikan secara statistik. Dapat disimpulkan bahwa antara Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak memiliki hubungan positif atau hubungan searah dimana apabila Kepemilikan Institusional naik maka Penghindaran Pajak akan naik.

Tabel 10.
Hasil Koefisien Determinasi Variabel Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Correlations

		Kepemilikan Manajerial	Penghindaran Pajak
Kepemilikan Manajerial	Pearson Correlation	1	,397*
	Sig. (2-tailed)		,030
	N	30	30
Penghindaran Pajak	Pearson Correlation	,397*	1
	Sig. (2-tailed)	,030	
	N	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

$KD = r^2_{XY} \text{ X } 100\% = (0{,}397)^2 \text{ X } 100\% = 15{,}76\%$

Dari tabel 10, berdasarkan perhitungan data diatas, kontribusi yang diberikan oleh variabel Kepemilikan Manajerial adalah sebesar 15,76%. Artinya adalah koefisien determinasi tersebut 15,76% penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Lalu, sisanya 84,24% dipengaruhi faktor atau variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 11.
Hasil Koefisien Determinasi Variabel Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Correlations

		Kepemilikan Institusional	Penghindaran Pajak
Kepemilikan Institusional	Pearson Correlation	1	,390*
	Sig. (2-tailed)		,033
	N	30	30
Penghindaran Pajak	Pearson Correlation	,390*	1
	Sig. (2-tailed)	,033	
	N	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

$KD = r^2_{XY} \text{ X } 100\% = (0{,}390)^2 \text{ X } 100\% = 15{,}21\%$

Dari tabel 11, berdasarkan perhitungan data diatas, kontribusi yang diberikan oleh variabel Kepemilikan Institusional adalah sebesar 15,21%. Artinya adalah koefisien determinasi tersebut 15,21% penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Lalu, sisanya 84,79% dipengaruhi faktor atau variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 12.
Hasil Uji Hipotesis Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,164	,057		-2,854	,008
	Kepemilikan Manajerial	,392	,065	,812	6,016	,000
	Kepemilikan Institusional	,385	,064	,807	5,981	,000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 12, nilai df = 30-2-1 = 27, maka nilai t_{tabel} yang didapatkan untuk pengujian dua pihak atau Sig. (2-tailed) sebesar ± 2,052. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa t_{hitung} yang didapatkan adalah 6,016 > ± 2,052, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis dinyatakan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau 0% dimana angka ini lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditentukan yaitu 5% dan t_{hitung} tertanda positif maka dapat disimpulkan secara parsial variabel Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak terdapat pengaruh signifikan dan searah.

Tabel 13.
Hasil Uji Hipotesis Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,164	,057		-2,854	,008
	Kepemilikan Manajerial	,392	,065	,812	6,016	,000
	Kepemilikan Institusional	,385	,064	,807	5,981	,000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Lampiran Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 13, nilai df = 30-2-1 = 27, maka nilai t_{tabel} yang didapatkan untuk pengujian dua pihak atau Sig. (2-tailed) sebesar ± 2,052. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa t_{hitung} yang didapatkan adalah 5,981 > ± 2,052, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis dinyatakan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau 0% dimana angka ini lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditentukan yaitu 5% dan t_{hitung} tertanda positif maka dapat disimpulkan secara parsial variabel Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak terdapat pengaruh signifikan dan searah.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perbandingan antara thitung dan ttabel, ditemukan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Dengan tingkat kesalahan 5%, ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, setiap peningkatan satu unit dalam kepemilikan manajerial diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan tindakan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial, semakin besar kemungkinan perusahaan menerapkan strategi untuk menghindari pajak.

Teori yang dikemukakan oleh Meliani & Lesmana (2021:12) yang menyatakan apabila tingkat kepemilikan saham manajerial di suatu perusahaan tinggi, maka pengaruh pihak manajemen terhadap praktik penghindaran pajak juga akan semakin besar, karena kepemilikan manajerial yang tinggi tidak efektif dalam mengurangi perilaku penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial sering menghadapi kesulitan dalam hal investasi karena manajemen juga berfungsi sebagai pemegang saham. Dalam situasi ini, investor institusi tidak dapat menekan manajemen atau mempengaruhi keputusan mereka, sehingga manajemen memanfaatkan kesempatan ini untuk membagikan dividen dalam jumlah besar guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Hasil dari penelitian ini menjawab fenomena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak telah mencapai Rp 342,88 triliun hingga 15 Maret 2024, namun realisasi ini hanya mencapai 17,24% dari target APBN 2024. Sri Mulyani menjelaskan bahwa perlambatan penerimaan pajak disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada tahun 2023 yang dampaknya baru terasa tahun ini. Akibatnya, tahun 2023 perusahaan-perusahaan mengajukan restitusi pajak. Meski demikian, penerimaan pajak bruto di luar restitusi masih tumbuh sebesar 5,74% hingga 15 Maret 2024 (Afriyadi, 2024), dimana penurunan kepemilikan manajerial sering diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak, karena hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan insentif dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, yaitu BUMN. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa terdapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak, dengan menegaskan bahwa peningkatan tingkat kepemilikan manajerial cenderung mendorong praktik penghindaran pajak yang lebih agresif.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel}, ditemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Dengan tingkat kesalahan 5%, ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, setiap peningkatan satu unit dalam kepemilikan institusional diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan tindakan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, semakin besar kemungkinan perusahaan menerapkan strategi untuk menghindari pajak.

Teori yang dikemukakan oleh Nanditama & Ardiyanto (2021:3) menyatakan bahwa peningkatan jumlah kepemilikan saham oleh institusi dapat mendorong perilaku penghindaran pajak perusahaan, karena kepemilikan institusional yang pasif memberi kebebasan lebih kepada manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Ketika perusahaan dengan kepemilikan institusional menghadapi tantangan terkait beban pajak dari dividen, institusi tersebut dapat menekan manajemen untuk mempengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan.

Hasil dari penelitian ini menjawab fenomena PT Aneka Tambang Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan mengakali pajak emas impor yang berasal dari Singapura, diketahui barang tersebut ketika dari Singapura semestinya terkena bea impor 2.5% dan PPh impor 5% namun ketika sampai di bandara kode barang berubah sehingga tidak terkena pajak (2020) (Umah, 2021), dimana penurunan kepemilikan institusional seringkali diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kepatuhan investor terhadap kewajiban pajak, yang memaksa manajemen untuk menerapkan strategi penghindaran pajak. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, rentang waktunya, serta penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini juga mengonfirmasi adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak, dengan menegaskan bahwa peningkatan tingkat kepemilikan institusional cenderung mendorong praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi pada sektor BUMN.

5. KESIMPULAN

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan BUMN periode 2021-2023. Besarnya pengaruh masuk pada kategori rendah, menjelaskan bahwa menegaskan bahwa peningkatan tingkat kepemilikan manajerial cenderung mendorong praktik penghindaran pajak yang lebih agresif. Tingginya kepemilikan manajerial akan menyebabkan praktik penghindaran pajak meningkat.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan BUMN periode 2021-2023. Besarnya pengaruh masuk pada kategori rendah, menegaskan bahwa peningkatan tingkat kepemilikan institusional cenderung mendorong praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi pada sektor BUMN. Tingginya kepemilikan institusional akan menyebabkan praktik penghindaran pajak meningkat.

REFERENSI

Achmad Tarmizi, & Didin Hikmah Perkasa. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(2), 112–122. https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.277

Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.

Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, *6*(2), 132. https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968

Afriyadi, A. D. (2024). *Penerimaan Pajak Lesu Buntut Penurunan Harga Komoditas, Baru Terkumpul Segini*. Detikfinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7260649/penerimaan-pajak-lesu-buntut-penurunan-harga-komoditas-baru-terkumpul-segini

Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, *18*(3), 407–418. https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311

Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(2), 179–194. https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122

Haloho, S. F. R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(1), 705–719. https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1147

Hamidah, Junaidi, Rialdy, N., Suhartono, E., Amusiana, Sahusilawane, W., Lidyah, R., Isfaatun, E., Lumbanraja, T., & Surayuda, R. N. I. (2023). *Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri. https://books.google.co.id/books?id=RRe2EAAAQBAJ

Hidayati, S. N. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020. *Journal of Economic Perspectives*, *2*(1), 1–4. http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017

Hikmah, N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitability, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, *12*(1), 1–19.

Meliani, C. N., & Lesmana, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi Akuntansi*, *3*, 1–15.

Nanditama, T. A., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, *10*, 1–4. http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Pertiwi, T., & Juniarti. (2020). Kepemilikan Institusional , Leverage Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan Bara Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2014-2018. *Stie*, 1–21. http://repository.stei.ac.id/2602/

Umah, A. (2021). *Antam Disebut-sebut Dalam Skandal Impor Emas Rp47 Triliun*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20210615141059-17-253265/antam-disebut-sebut-dalam-skandal-impor-emas-rp47-triliun

Yamasitha, Assagaf, A., & Zefriyenni. (2024). *Perkembangan Nilai Perusahaan Sebelum dan Selama Covid 19*. CV. Gita Lentera. https://books.google.co.id/books?id=LOf4EAAAQBAJ

Yeni, F., Hady, H., & Wardana, M. A. (2024). *Nilai Perusahaan Berdasarkan Determinan Kinerja Keuangan*. CV. Intelektual Manifes Media. https://books.google.co.id/books?id=j9v-EAAAQBAJ